

**PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO PROYEK PADA SPBE/E-GOVERNMENT
BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020
(STUDI KASUS: PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG)
*PROJECT RISK MANAGEMENT DESIGN ON E-
GOV/SPBE BASED ON PERMEN PANRB NUMBER 5 YEAR 2020
(CASE STUDY:GOVERNMENT OF BANDUNG DISTRICT)***

Khoirotun Nisa¹, Rokhman Fauzi², Rahmat Mulyana³

^{1,2,3}Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom

¹khoirotunnisa@student.telkomuniversity.ac.id, ²rokhmanfauzi@telkomuniversity.ac.id,

³rahmatmoelyana@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung. Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Bandung belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko proyek sesuai tujuan SPBE. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya mekanisme dalam pengelolaan risiko proyek SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, diperlukan perancangan manajemen risiko proyek pada Pemerintah Kabupaten Bandung agar dapat memenuhi tujuan organisasi sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terkait hal ini, perlu dilakukan penelitian tentang proses manajemen risiko proyek dengan mengacu pada peraturan menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko SPBE.

Perancangan Manajemen Risiko Proyek ini mengacu pada kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* dan ISO 31000:2018. Kemudian proses penelitian diawali dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan terkait manajemen risiko proyek pada Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai sumber pengetahuan dan penelitian dalam melakukan perancangan. Maka dari itu, akan dilakukan evaluasi, analisis, dan penilaian terhadap kondisi eksisting terkait manajemen risiko proyek yang mengacu pada kerangka kerja COBIT 5 *for Risk*, kemudian digunakan sebagai bahan acuan dalam proses penanganan risiko yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Tujuan dari perancangan manajemen risiko proyek yaitu membantu meningkatkan nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung dari 2,8 menjadi 3, serta menghasilkan dokumen rekomendasi perancangan personil, proses dan teknologi berdasarkan profil risiko proyek, dimana terdapat 14 risiko proyek negatif dan 7 risiko proyek positif. Kemudian menghasilkan rancangan personil berupa penambahan deskripsi kerja dan kompetensi SDM, hasil proses berupa kebijakan manajemen risiko proyek SPBE, *Standar Operational Procedure* (SOP) dan intruksi kerja serta hasil rancangan teknologi menghasilkan *tools* yang dapat digunakan dalam penerapan manajemen risiko proyek SPBE.Bandung.

Kata Kunci: Pemerintah Kabupaten Bandung, PERMEN PANRB, SPBE, Manajemen Risiko Proyek, ISO 31000:2018, COBIT 5 for Risk.

Abstract

Bandung Regency Government is one of the technical institution of the area that has the main task of conducting local government affairs in Bandung regency. In its implementation, Bandung District government has not fully implemented project risk management in accordance with SPBE objectives. This is demonstrated by the not optimal mechanisms in the management of the risk of SPBE project in Bandung District government. Therefore, it is necessary to design project risk management in Bandung District government in order to fulfill the objectives of the Organization in accordance with the electronic-based government system (SPBE). Related to this, need to be done research on project risk management process by referring to the ministerial regulation of PANRB number 5 year 2020 about SPBE risk policy guidelines.

Risk management Planning This project refers to the framework COBIT 5 for Risk and ISO 31000:2018. Then the research process begins with conducting literature studies and field studies related to project risk management at the Bandung Regency Government as a source of knowledge and research in designing. Therefore, evaluation, analysis, and assessment of existing condition related to risk management of project that refers to the framework of COBIT 5 for Risk, then used as reference material in the process of handling risk that occurred in the government of Bandung regency.

The purpose of project risk management planning is to help increase the value of SPBE index in Bandung Regency government from 2.8 to 3, as well as produce recommendation document of personnel, process and technology based on project risk profile, where there are 14 negative project risk and 7 risk of positive project. Then resulted in the design of personnel in the form of addition of work descriptions and HR competence, the result of the process of risk management policy of SPBE project, Standard Operational Procedure (SOP) and work instruction as well as the technology design produce tools that can be used in the application of SPBE project risk management.

Keywords: Bandung Regency Government, PERMEN PANRB, SPBE, Project Risk Management, ISO 31000:2018, COBIT 5 for Risk.

1. Pendahuluan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertera pada pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi terdapat faktor yang menjadi hambatan atau risiko seiring dengan berjalannya proses yaitu berasal dari personil, proses, dan teknologi yang ada pada perusahaan atau organisasi.

Salah satu risiko yang muncul dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu risiko proyek. Risiko Proyek merupakan kejadian yang tidak tentu, jika terjadi akan memiliki efek positif dan negatif terhadap tujuan proyek. Baik berupa biaya, waktu, mutu, dan ruang lingkup. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan SPBE. Manajemen risiko proyek merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah risiko proyek yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang muncul dalam proyek dengan melakukan penilaian risiko menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 yang telah mengadopsi dari kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* dan ISO 31000:2018.

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di kabupaten bandung. Pemerintah menyadari pentingnya peran *e-Government* untuk mendukung semua sektor pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Nama Perusahaan Daerah	Jumlah Aplikasi
Dinas Kesehatan	23
DPMPSTP	2
Satpol PP	2
BAPEDA	9
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2
DISHUB	4
DISPUSIP	4
DPMD	5
BKD	6
DISPARBUD	2
DISPERIN	1
Dinas PUPR	5
Dinas Lingkungan Hidup	4
RSUD Majalaya	6

Nama Perusahaan Daerah	Jumlah Aplikasi
BPBD	1
Dinas Pendidikan	3
RSUD Soreang	2
Disnaker	1
DP2KBP3A	4
Disdukcapil	5
Diskominfo	4
Diskop-UKM	2
Dispakan	2
Bagian Organisasi	3
Bagian Hukum	1
BKPPD	5
Bagian Barang Jasa	3
Total	113

Berdasarkan hasil studi lapangan melalui wawancara pemerintah kabupaten bandung memiliki 113 aplikasi yang dikelola perangkat daerah pemerintah kabupaten bandung. Aplikasi ini terbagi atas jumlah aplikasi disetiap perusahaan daerah (PD). Pemerintah Kabupaten Bandung juga memiliki 23 aplikasi inti dan aplikasi generik.

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa pentingnya perancangan manajemen risiko proyek pada Pemerintah Kabupten Bandung untuk meminimalisir risiko yang ada serta mewujudkan tujuan dari SPBE. Permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir atau bahkan diperbaiki dengan menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 yang telah mengadopsi dari kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* dan ISO31000:2018 untuk memperbaiki risiko yang muncul agar proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, dan mengetahui risiko proyek agar proses dapat berjalan sesuai tujuan organisasi dan tujuan SPBE.

2. Dasar Teori

2.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020 merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Sedangkan menurut Fahmi (2016), manajemen risiko suatu bidang ilmu yang dengan secara spesifik membahas tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu menerapkan ukuran dalam memetakan seluruh permasalahan dengan menggunakan pendekatan manajemen dengan secara sistematis serta juga komprehensif.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen risiko merupakan strategi untuk mencapai keamanan informasi agar tidak berpengaruh terhadap organisasi.

2.2 Manajemen Risiko Proyek

Manajemen risiko proyek menurut Erizal (Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, IPB) merupakan Proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Proses yang terlibat yaitu : Perencanaan manajemen risiko, Identifikasi risiko, Analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, Perencanaan respon risiko, dan Pengendalian dan monitoring risiko.

2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, 2020).

2.4 Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020

2.5 Electronic Government

E-Government Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government yaitu suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet, dan memperbaiki mutu kualitas pelayanan.

Perkembangan *e-government* pada tahun ini Indonesia mendapat peringkat ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti tahun 2016. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Philippines (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI). Posisi pertama hingga kelima, berturut-turut diraih oleh Denmark, Australia, Republik Korea, United Kingdom, dan Swedia. Nilai rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555. Hasil peringkat EGDI ini harus semakin mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan implementasi e-Government di seluruh penjuru negeri. Hal ini tentunya menjadikan suatu tantangan bagi Indonesia untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur TIK.

2.6 ISO 31000:2018

ISO 31000:2018 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas tiga elemen: prinsip (principle), kerangka kerja (framework), dan proses (process). Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait, memberikan pedoman dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Penerapan pedoman ini dapat disesuaikan untuk organisasi apa pun dan konteks ISO 31000: 2018 dapat digunakan sepanjang umur organisasi dan dapat diterapkan untuk aktivitas apa pun, termasuk pengambilan keputusan di semua tingkatan (ISO/IEC).

ISO 31000:2018 menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan (1) meningkatkan kinerja, (2) mendorong inovasi, dan (3) mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola (governance) dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

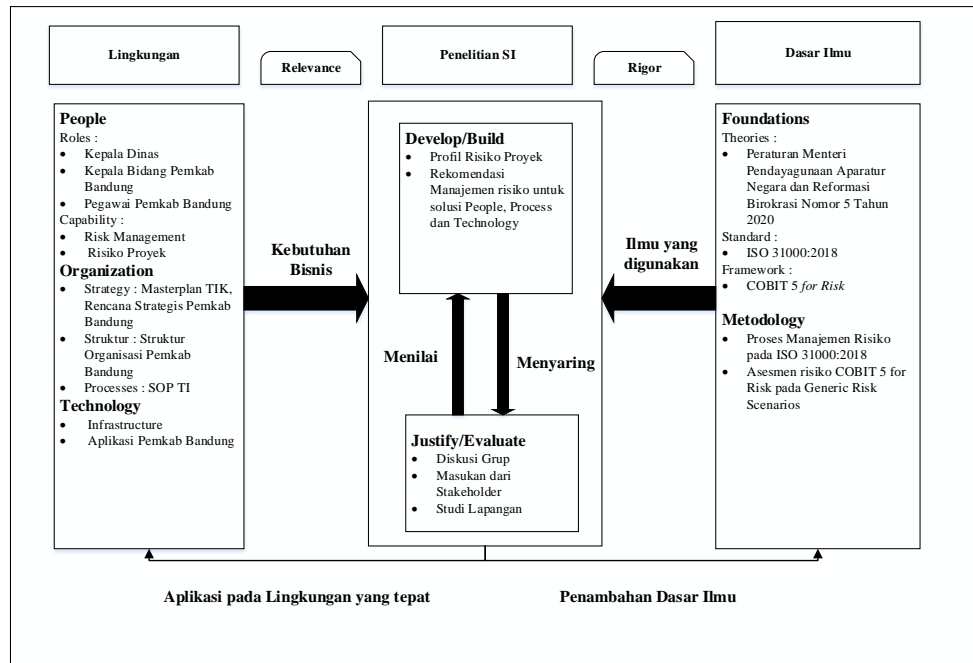
2.7 COBIT 5 For Risk

COBIT 5 *for Risk* merupakan salah satu produk dari COBIT 5. Dimana COBIT 5 *for risk* lebih berfokus kepada risiko dan juga menyediakan lebih banyak panduan rinci dan praktis bagi profesional risiko dan pihak lain yang berkepentingan di semua tingkat pemerintahan. COBIT 5 *for risk* juga membahas tentang pertanyaan mendasar dan isu-isu tentang manajemen risiko TI (ISACA, 2013). COBIT 5 *for risk* juga merupakan standar dan best practice. Pengertian dari best practice itu sendiri adalah suatu ide ataupun gagasan tentang suatu metode, proses, atau aktivitas yang efektif dan efisien dalam membantu menyelesaikan suatu masalah serta pencapaian tujuan di organisasi. Dimana keluaran dari proses pada COBIT 5 *for risk*, satunya adalah dokumen best practices.

3. Pembahasan

3.1 Model Konseptual

Model konseptual atau kerangka konseptual suatu penelitian adalah suatu model konseptual yang menunjukkan hubungan logis antara faktor/variabel yang telah diidentifikasi penting untuk menganalisis masalah penelitian (Sinulingga, 2014).



1. Lingkungan Penelitian

Berdasarkan gambar model konseptual bahwa penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tugas untuk mengautomatisasi semua pelayanan publik demi mewujudkan tujuan SPBE. Pemangku kepentingan yang terlibat yaitu kepala dinas dan pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam mendukung proses bisnis organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung didukung oleh Masterplan TIK Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021, Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, Standar Operasional Prosedur (SOP) TI, Kebijakan TI. Untuk mendukung TI dibantu oleh infrastruktur aplikasi Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub-bab latar belakang.

2. Dasar Ilmu

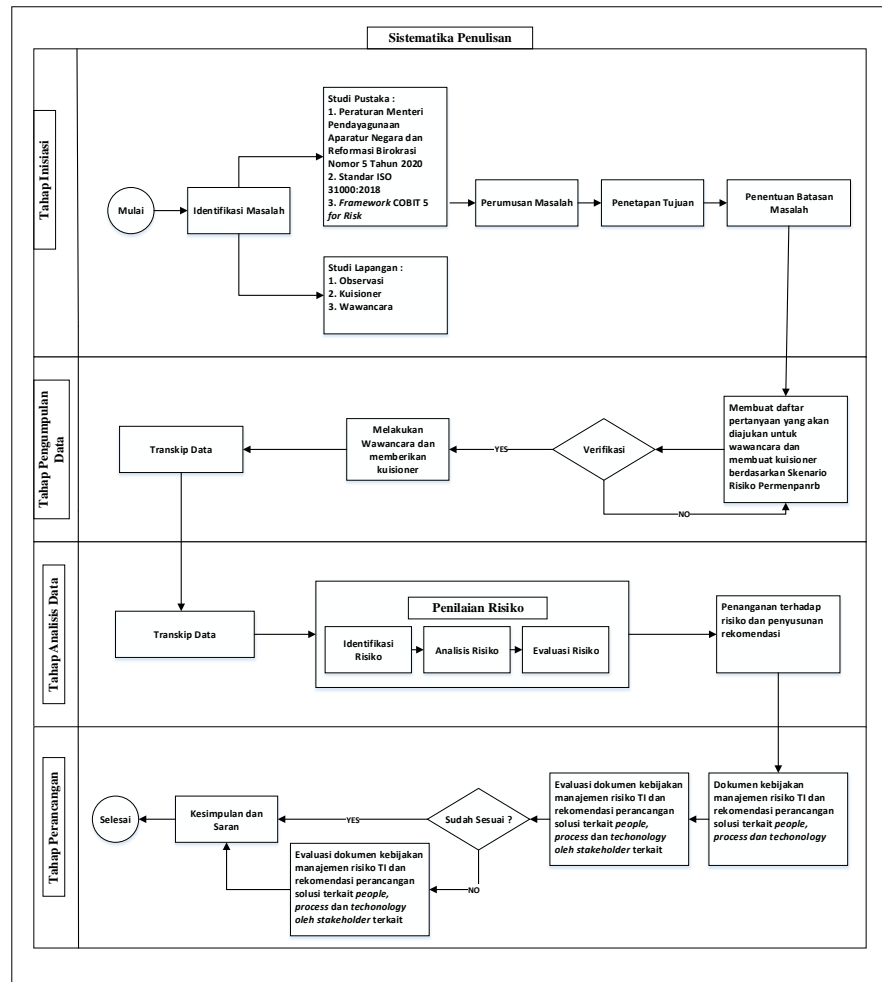
Dalam mendukung penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan Standar ISO 31000:2018 yang digunakan untuk tahapan-tahapan proses manajemen risiko serta COBIT 5 *for Risk* yang digunakan untuk penilaian risiko. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu proses manajemen risiko pada ISO 31000:2018 dan penilaian risiko pada COBIT 5 *for Risk*.

3. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini akan menghasilkan dokumen profil risiko dan manajemen risiko terkait solusi personil, proses dan teknologi. Sebelumnya akan dilakukan tahap diskusi grup, menerima masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan penelitian untuk menentukan bahwa rekomendasi dari penelitian ini sudah tepat. Kemudian dilakukan juga studi lapangan untuk mengetahui kondisi organisasi yang akan dijadikan objek penelitian serta menggali data yang dibutuhkan untuk membantu proses penelitian.

3.2 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun IT artefak serta cara mengevaluasinya. Langkah-langkah tersebut diilustrasikan dalam sebuah diagram flow serta penjelasannya. Sebagai panduan dapat digunakan "System Development Framework" yang terdiri dari 4 fase, yaitu *conceptual design*, pembangunan arsitektur dari sistem yang akan dikembangkan, analisis dari rancangan, *prototyping* (termasuk pengembangan IT artefak), dan evaluasi (Hevner & Chatterjee, 2010).



Berdasarkan gambar sistematika penelitian, dapat diambil penjelasan alur penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi

Pada tahap ini akan dilakukan perumusan masalah yang terjadi, penetapan tujuan penelitian, dan batasan masalah. Pada bab ini juga didukung oleh studi literatur yaitu dengan menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020, ISO 31000 dan kerangka kerja COBIT 5 *for Risk*. Sedangkan berdasarkan studi lapangan dilakukan observasi, kuisisioner dan wawancara, maka hasil yang didapatkan berupa Masterplan TIK Tahun 2017-2021, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, SOP Teknologi Informasi, Struktur Organisasi, Kebijakan TI Pemkab dan Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini akan dilakukan observasi, kuisisioner dan wawancara kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020. Pada tahap pengumpulan data dapat memudahkan penulis dalam melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap analisis.

3. Tahap Analisa

Pada tahap analisis data dilakukan dengan menggunakan ISO 31000:2018 sebagai pedoman tahapan-tahapan proses yang akan dilakukan dalam manajemen risiko. Tahap pertama dengan melakukan wawancara untuk mengetahui risiko yang mungkin terjadi pada organisasi. Kemudian dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 *for Risk* untuk melakukan penilaian risiko yang nantinya digunakan untuk identifikasi risiko, melakukan analisis risiko dan evaluasi risiko. Dari penilaian risiko akan didapatkan profil risiko dan kemudian dari profil risiko dapat dilakukan risk treatment atau penanganan risiko untuk menentukan rekomendasi solusi terkait personal, proses dan teknologi.

4. Tahap Perancangan

Pada tahap perancangan dilakukan dengan menganalisis hasil rekomendasi lalu melakukan perancangan terkait solusi aspek personal, proses dan teknologi. Dari hasil perancangan solusi tersebut, dihasilkan dokumen dari aspek personal, proses dan teknologi. Setelah pembuatan rekomendasi, dilakukan evaluasi pada solusi aspek personal, proses dan teknologi tersebut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait. Jika hasil rekomendasi tersebut belum sesuai, maka dilakukan perbaikan rekomendasi. Sedangkan jika rekomendasi sudah sesuai maka tahap perancangan penelitian ini selesai. Sebelum tahapan yang dilakukan selesai akan dilakukan pembuatan kesimpulan. Pada tahapan ini dihasilkan jawaban dari tujuan penelitian dan dari seluruh tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan

pembuatan kesimpulan dan saran berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah kesimpulan dibuat maka tahapan selesai dilakukan.

4. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

4.1 Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE.

4.2 Analisis Risiko

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE.

4.3 Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE yang telah diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

4.4 Penanganan Risiko

Penanganan Risiko SPBE merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE. Penanganan Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE. Opsi penanganan Risiko SPBE ada dua yaitu penanganan Risiko SPBE Positif dan penanganan Risiko SPBE Negatif.

5. Perancangan Solusi Personil, Proses dan Teknologi

5.1 Perancangan Personil

Pada aspek perancangan personil, berfokus pada penambahan uraian tugas untuk penerapan perlindungan data pribadi dengan kebutuhan berjalannya proses bisnis yang lebih baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh pegawai, agar proses perlindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif.

5.2 Perancangan Proses

Pada Pada tahap ini berfokus pada perancangan kebijakan dan prosedur operasional untuk mendukung dan memberikan panduan dan mendukung proses bisnis yang berjalan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung.

5.3 Perancangan Teknologi

Pada perancangan teknologi, dilakukan berdasarkan rekomendasi dari temuan risiko yang telah dilakukan sebelumnya untuk Pemerintahan Kabupaten Bandung. Pada hasil penilaian risiko, terdapat temuan bahwa belum adanya sistem aplikasi untuk pengelolaan Human Resource dan pengelolaan tugas dan tanggung jawab serta pengelolaan aset dan perangkat.

6. Kesimpulan Perancangan Solusi Personil, Proses dan Teknologi

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Perancangan Manajemen Risiko Proyek berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE. Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan menghasilkan *risk profile* SPBE pada risiko negatif dan risiko positif.
2. Rekomendasi dari aspek personil peningkatan kompetensi SDM dan penambahan deskripsi.
3. Rekomendasi dari aspek proses dilakukan perancangan kebijakan dan standar prosedur operasional.
4. Rekomendasi aspek Teknologi dilakukan perancangan *tools* pengelolaan tugas dan tanggung jawab.

Daftar Pustaka:

[1]	Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. <i>European Journal of Operational Research</i> , 13.
[2]	Arief, M. H., & Suprpto. (2018). Evaluasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 (Studi Kasus Pada Perum Jasa Tirta I Malang). <i>Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer</i> , 101-110.
[3]	Edwin. (2018, April 12). Standar Baru Manajemen Risiko ISO 31000:2018. Diambil kembali dari ibfgi.com: https://ibfgi.com/risk-management-31000/
[4]	Fajrin, R. A., Murahartawaty, & Gumilang, S. F. (2016). Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di BAPAPSI Pemkab Bandung Menggunakan framework COBIT 5 Pada Domain EDM dan DSS. <i>Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence</i> , 7.
[5]	ISO. (2018). Risk management — Guidelines, ISO 31000.
[6]	Jovanović, F., Milijić, N., Dimitrova, M., & Mihajlović, I. (2016). Risk Management Impact Assessment on the Success of Strategic Investment Projects: Benchmarking Among Different Sector Companies. <i>Acta Polytechnica Hungarica</i> , 221-241.
[7]	Megawati, & Syntia, A. (2018). EVALUASI MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5.0 . <i>Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi</i> , 5.
[8]	Mulyana, R. (2018). ISO 31000 Risk management-Guidelines. Indonesia: Iqbal Santosa.
[9]	Mulyana, R. (2013). COBIT 5 for Risk. Indonesia: Iqbal Santosa.
[10]	Mulyana, R. (2018). Sosialisasi Perpres No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indonesia: Rahmat Mulyana.
[11]	REPUBLIK, P. A. (2020). PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. Indonesia.